GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Jurnal Nasional**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**14 November 2007**
Subyek	**:**	**Pemanasan Global**	**Hari**	**:**	**Rabu**
			Halaman	**:**	**06**

IDI Bentuk Gugus Tugas Pemanasan Global

Pemanasan global sudah merupakan isu dunia. Kendati begitu masih banyak yang menilai pemanasan global isu lingkungan semata. Padahal, isu tersebut juga bersentuhan langsung dengan banyak bidang, dan salah satunya kesehatan.

"Pemanasan global menimbulkan efek langsung terhadap kesehatan manusia berupa peningkatan insiden dan prevalensi beragam penyakit," ujar Ketua IDI Fahmi Idris usai acara diskusi tentang dampak pemanasan global terhadap kesehatan yang berlangsung di kantor IDI Jakarta kemarin (13/11).

Karena itu IDI menganggap penting perlunya program kesehatan nasional yang memasukan juga isu perubahan iklim tersebut terkait ketahanan kesehatan masyarakat. "Kami sendiri akan membentuk *task-force* yang bertugas mengadvokasi berbagai elemen agar program kesehatan lebih antisipatif terhadap isu perubahan iklim," kata Fahmi lagi.

Fahmi lantas mengungkap, secara internal tim tersebut akan mengoptimalkan peran dokter dalam meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya perubahan iklim bagi kesehatan, baik saat ini maupun masa mendatang. Yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh IDI adalah mengajak dan mengimbau pemerintah untuk menyusun sebuah agenda kesehatan nasional yang antisipatif terhadap isu pemanasan global ini.

Keterlambatan mengantisipasi akan sangat berpengaruh pada index pembangunan manusia dan menganggu target pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah Indoensia. Diharapkan dengan adanya *task force* khusus yang dibentuk IDI tersebut, sekaligus pula dapat merevitalisasi peran dokter sebagai *agent of social change* dan *agent of development.*

Hal senada disampaikan pembicara dari Guru Besar UI Prof Fahmi Ahmadi. Ia menilai selama ini pemerintah kurang merespons isu lingkungan yang terkait dengan kesehatan. "Memang masih relevan visi Indonesia 2010 tentang kesehatan, tapi ego sektor masih kentara di sini," katanya.

Ia lantas mencontohkan, Palang Merah Indonesia (PMI) mempunyai program antisipatif sendiri tentang penanganan korban bencana akibat perubahan iklim. Bahkan Hari Kesehatan Nasional tempo hari, yang seharusnya menjadi hari milik masyarakat Indonesia hanya milik Departemen Kesehatan semata. Kepanitiaan dan gaung yang hanya terkonsentrasi di internal Depkes saja.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Hal yang sama terjadi di intansi lain. Hal itu membuktikan apabila koordinasi kurang berjalan dengan baik. "Menghadapi perubahan iklim, bahkan di bidang kesehatan kesehatan sekalipun, masing-masing sibuk dan jalan sendiri-sendiri," kata Ahmadi menyesal.

Pembicara lain dari Unika Atmajaya, Prof Charles Surjadi, menilai ada dua komponen penting yang harus digarap pemerintah apabila kesehatan menjadi agenda utama isu dampak perubahan iklim. "Impelementasi melalui kekeuatan kewenangan pemerintah dan *local connectivity* menghadapi bencana kesehatan yang mungkin timbul," katanya.

Dalam hal tersebut, baik Fahmi Ahmadi maupun Charles sepakat akan fungsi dasn peran pemerintah ditingkat lokal harus ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesadaran publik. Caranya melalui perda-perda dan peraturan kondusif yang sejalan dengan isu kesehatan dan lingkungan.

Sebagaimana diketahui sebanyak 41 juta penduduk Indoensia yang bermukim di daerah pantai akan terkena dampak langsung dengan naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di belahan bumi selatan dan utara.

Yang lebih penting lagi perubahan iklim tersebut akan menjadi media bagi munculnya berbagai penyakit baru, baik yang *emerging disease* (penyakit baru) ataupun *re-emerging disease* (penyakit lama yang muncul kembali).

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP